

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hak atas pangan di Indonesia telah diatur berdasarkan pada Undang-Undang HAM. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan baik melalui berbagai kebijakan, termasuk membentuk kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR. Namun, upaya tersebut masih belum mampu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat secara merata, terutama di kawasan Indonesia Timur. Salah satu alasan utama sulitnya meningkatkan ketahanan pangan adalah kondisi geografis yang sulit untuk dijangkau. Hal tersebut menyebabkan upaya pembangunan infrastruktur menjadi sulit, sehingga perekonomian masyarakat sulit untuk berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah upaya bersama dengan pihak lain dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pada penelitian ini, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Melalui program ini, IFAD telah berhasil meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui berbagai program pengembangan petani. Keberhasilan program ini selama tahun 2011-2019 dapat dilihat dari peningkatan pada pendapatan dan aset rumah tangga, *human* dan *social capital*, ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan akses petani terhadap pasar. Namun, terdapat berbagai kendala yang dihadapi saat pelaksanaan program ini, termasuk keterlambatan dalam pelaksanaan program selama 3 tahun pertama, manajemen staf yang masih kurang baik, sistem pemantauan dan evaluasi yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan program pinjaman yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan awal.

IFAD sebagai sebuah organisasi internasional telah mampu mengidentifikasi berbagai masalah yang menyebabkan rendahnya perekonomian masyarakat di Indonesia Timur yang mendorong rendahnya ketahanan pangan masyarakat. Oleh sebab itu, IFAD mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan pemerataan ketahanan pangan dengan program SOLID. IFAD melalui program SOLID telah mampu menentukan solusi

yang tepat bagi masyarakat pedesaan terpencil di Provinsi Maluku Utara serta pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Melalui program ini juga, IFAD telah berhasil membujuk aktor lain seperti pemerintah Indonesia dalam menerima keputusan dan kebijakan mereka untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Berdasarkan pada konsep peran organisasi internasional menurut Clive Archer pada penelitian ini, IFAD Indonesia yang merupakan sebuah organisasi internasional telah mampu menjalankan perannya sebagai sebuah instrumen kebijakan bagi Indonesia untuk mencapai pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan melalui berbagai aturan dan kebijakan yang telah disepakati bersama antara IFAD dan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, IFAD telah membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan di Kawasan Indonesia Timur melalui program SOLID yang mendorong peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

IFAD Indonesia juga telah berperan sebagai sebuah arena dalam memberikan ruang diskusi antara pemerintah Indonesia dengan berbagai aktor yang terlibat dalam program ini seperti, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, NGO lokal, dan pemerintah daerah untuk saling bekerja sama dalam mencapai ketahanan pangan dan peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan di Kawasan Indonesia Timur melalui program SOLID. Contohnya melalui pertemuan dalam pertemuan tinjauan tengah waktu tahun 2014 yang mempertemukan berbagai pihak yang terlibat dalam program ini untuk memaksimalkan dampak serta ruang lingkup program SOLID. IFAD Indonesia juga telah menjadi aktor independen dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program ini, termasuk dalam kegiatan pembiayaan dan pinjaman, pembangunan infrastruktur, pengadaan berbagai peralatan, serta pelatihan staf.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Dalam pelaksanaan program ini tentunya masih terdapat beberapa kekurangan yang dihadapi oleh IFAD Indonesia. Program ini pada awalnya memiliki kerangka kerja yang sangat ambisius tanpa memperhatikan lebih detail

mengenai pelaksanaan program ini, termasuk tanpa memperkirakan lebih lanjut mengenai sulitnya akses terhadap desa yang menjadi target program ini dilaksanakan. Cakupan program yang terlalu luas menyebabkan program ini tidak berdampak besar pada awal pelaksanaannya bagi masyarakat. Selain itu, IFAD juga masih belum mampu untuk meminimalisir kerja beban berlebih bagi para staf di lokasi. Sehingga, penulis berharap IFAD Indonesia dapat lebih teliti dan detail dalam merencanakan program di daerah terpencil di Indonesia dengan mempertimbangkan efektivitas program.

Penulis juga berharap bahwa program SOLID ini bukan hanya dilaksanakan di beberapa pedesaan terpencil di Provinsi Maluku Utara, namun juga di wilayah lainnya, terutama di Indonesia Timur. Pada program ini, IFAD juga masih belum memberdayakan anak muda secara maksimal, mengingat programnya belum ada yang ditujukan secara khusus untuk pemberdayaan anak muda. Oleh sebab itu, penulis berharap bahwa kedepannya IFAD Indonesia dapat melaksanakan program yang juga berupaya untuk memberdayakan anak muda di berbagai wilayah terpencil di Indonesia.

6.2.2 Saran Teoritis

Secara akademis, masih belum banyak penelitian yang membahas mengenai peran IFAD sebagai sebuah organisasi internasional dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat pedesaan. Bahkan, di Indonesia masih sangat sulit untuk menemukan penelitian terkait peran IFAD. Padahal, IFAD memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan di wilayah terpencil. Oleh sebab itu, penulis berharap bahwa kedepannya akan ada lebih banyak peneliti yang membahas peran dan kontribusi IFAD dalam membantu pemerintah di berbagai negara dalam memberdayakan masyarakat pedesaan di daerah terpencil.